

PENGARUH HOAKS TERHADAP STABILITAS NASIONAL: PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Desi Devrika Devra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru
E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com

Abstract: The spread of hoaxes has become a serious threat to national stability in the digital era. Hoaxes not only disinformation but also contribute to social disintegration, political polarization, horizontal conflict, and economic panic. This study aims to analyze the impact of hoaxes on various aspects of national life and explore the role of Civics Education (PKn) in addressing these threats. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained through a literature review of academic sources and government policies. The study results indicate that hoaxes can undermine public trust in state institutions and lead to multidimensional instability. On the other hand, PKn plays a strategic role in equipping citizens with digital literacy, Pancasila values, and critical and ethical attitudes in media use. By integrating digital literacy into the PKn curriculum, society can be more resilient to attacks of false information. This study recommends strengthening character education and legal understanding through PKn to create informed and socially responsible citizens.

Keywords: *Hoaxes, National Stability, Civic Education, Digital Literacy*

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa kemudahan dalam akses dan penyebaran informasi. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang tersebarnya informasi yang tidak benar atau dikenal sebagai hoaks. Hoaks merupakan informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebar untuk menyesatkan, memprovokasi, atau merugikan pihak tertentu (Kominfo, 2023). Penyebaran hoaks yang masif dan cepat berpotensi menimbulkan dampak negatif yang luas, terutama terhadap stabilitas nasional.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hoaks terhadap stabilitas nasional di Indonesia, serta bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam menangkal dampak negatif hoaks tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, penelitian akan mengkaji strategi-strategi yang dapat dioptimalkan dalam pendidikan kewarganegaraan, seperti penguatan literasi digital, penanaman nilai-nilai Pancasila, dan peningkatan kesadaran hukum.

Konsep Hoaks dalam Perspektif Informasi dan Komunikasi

Hoaks merupakan informasi palsu atau menyesatkan yang disebar secara

sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan memengaruhi opini publik, menciptakan kepanikan, atau merugikan pihak tertentu. Dalam kajian komunikasi, hoaks dikategorikan sebagai bentuk *disinformation*, yaitu informasi salah yang diproduksi secara sistematis dan sering kali dibungkus dengan narasi emosional agar mudah dipercaya (Hidayat, 2020). Pada era digital, hoaks berkembang pesat karena dukungan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, masif, dan lintas batas tanpa proses verifikasi yang memadai.

Stabilitas Nasional sebagai Konsep Multidimensional

Stabilitas nasional merupakan kondisi dinamis suatu negara yang ditandai oleh terpeliharanya ketertiban sosial, keamanan politik, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau keamanan fisik, tetapi juga pada ketahanan informasi dan kesadaran warga negara (Kurniawan & Ramadhan, 2021). Dalam konteks ini, hoaks dipandang sebagai ancaman non-tradisional yang dapat

melemahkan stabilitas nasional melalui disintegrasi sosial, delegitimasi pemerintah, dan gangguan keamanan.

Teori Literasi Digital

Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara kritis dan bertanggung jawab di ruang digital. Menurut Azis (2022), literasi digital mencakup keterampilan teknis, kognitif, dan etis dalam menggunakan media digital. Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat mudah terpapar hoaks dan cenderung menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi prasyarat penting dalam membangun ketahanan informasi dan menjaga stabilitas nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan dan Civic Literacy

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep *civic literacy* dalam PKn menekankan pemahaman warga negara terhadap hak dan kewajiban, nilai demokrasi, hukum, serta etika sosial (Sapriya, 2017). Dalam konteks penanggulangan hoaks, PKn berperan strategis sebagai wahana pembentukan kesadaran kritis, sikap etis bermedia, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Teori Pendidikan Karakter dan Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan ideologis dalam menyikapi dinamika sosial, termasuk arus informasi digital. Pendidikan karakter berbasis Pancasila menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan persatuan. Nilai-nilai ini menjadi filter normatif bagi warga negara agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa (Kemendikbudristek, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh hoaks terhadap stabilitas nasional dari berbagai aspek, mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan dalam menangkal hoaks, serta menemukan strategi efektif dalam pendidikan kewarganegaraan yang mampu membentuk literasi digital dan sikap kritis warga negara di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam pengaruh hoaks terhadap stabilitas nasional dari perspektif pendidikan kewarganegaraan berdasarkan literatur yang relevan dan terpercaya. Sumber data dalam penelitian ini berupa literatur utama tentang hoaks, stabilitas nasional, dan pendidikan kewarganegaraan dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah.

HASIL

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu, diperoleh beberapa temuan utama yang berkaitan dengan pengaruh hoaks terhadap stabilitas nasional serta peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapinya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hoaks di Indonesia banyak tersebar melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Jenis hoaks yang paling sering muncul berkaitan dengan isu SARA, politik, kesehatan, dan ekonomi. Hoaks umumnya dibuat dengan gaya bahasa persuasif dan provokatif untuk menarik emosi pembaca serta seringkali menyertakan narasi tanpa sumber yang valid. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023), selama tahun 2022–2023 terdapat lebih dari 1.200 konten hoaks yang teridentifikasi dan ditangani, yang sebagian besar menasar isu-isu politik dan kesehatan masyarakat.

Hasil penelitian ini menegaskan

bahwa hoaks merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas nasional, namun dapat diminimalkan melalui penguatan Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi pada literasi digital, pendidikan karakter, dan nilai-nilai Pancasila. Temuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan nasional di era digital

PEMBAHASAN

Dampak Hoaks terhadap Stabilitas Nasional

Hoaks dapat menyebabkan perpecahan sosial, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, bahkan konflik horizontal di masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hoaks yang beredar saat pemilu, pandemi, atau bencana alam mampu menciptakan kepanikan massal dan polarisasi masyarakat. Dampak hoaks terhadap stabilitas nasional dapat dibagi ke dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sosial: Hoaks dapat memicu disintegrasi sosial melalui penyebaran isu-isu sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Hoaks bernuansa provokatif sering kali menyebabkan kebencian antar kelompok masyarakat, memperuncing polarisasi, bahkan mengarah pada konflik horizontal. Contoh nyata adalah hoaks yang memicu kerusuhan di Wamena dan kasus penyerangan tempat ibadah akibat informasi palsu.
2. Aspek Politik: Hoaks berdampak besar dalam proses politik, terutama pada saat Pemilu atau Pilkada. Banyak kandidat politik yang menjadi sasaran kampanye hitam melalui penyebaran hoaks. Hal ini mengganggu proses demokrasi yang sehat dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu maupun institusi demokrasi. Hoaks juga menjadi alat politik untuk delegitimasi pemerintah.
3. Aspek Keamanan dan Hukum: Penyebaran hoaks dapat memunculkan kepanikan massal dan gangguan keamanan. Hoaks

mengenai penculikan anak, vaksin palsu, atau serangan teroris telah terbukti menciptakan kegaduhan yang berdampak pada tindakan hukum, penyelidikan, bahkan penangkapan yang tidak berdasar. Negara harus menyiapkan aparat dan infrastruktur hukum untuk menangani laporan-laporan palsu ini.

4. Aspek Ekonomi: Dalam beberapa kasus, hoaks mengenai kondisi ekonomi, harga bahan pokok, atau kebijakan pemerintah menyebabkan gejolak ekonomi dan kepanikan masyarakat. Contoh konkret adalah ketika beredar hoaks soal kelangkaan BBM atau beras, yang kemudian menyebabkan panic buying dan gangguan distribusi barang.

Oleh karena itu, hoaks bukan hanya permasalahan informasi, melainkan juga merupakan ancaman multidimensional terhadap keamanan nasional yang harus ditangani secara komprehensif.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Solusi

Terdapat beberapa pendekatan penting yang dapat diterapkan dalam PKn untuk menangkal hoaks :

1. Integrasi Literasi Digital: Literasi digital harus menjadi bagian integral dalam pembelajaran PKn. Peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi. Literasi digital juga mencakup kesadaran terhadap algoritma media sosial, cara kerja bot, serta teknik manipulasi informasi seperti deepfake.
2. Penanaman Nilai Kritis dan Skeptisisme Positif: Pendidikan Kewarganegaraan harus menumbuhkan sikap kritis, yaitu kemampuan untuk mempertanyakan, membandingkan, dan menyaring informasi sebelum mempercayainya. Sikap skeptis yang sehat sangat dibutuhkan dalam menghadapi informasi yang beredar di dunia maya.
3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila: Nilai-nilai luhur dalam Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, persatuan, dan kebenaran merupakan fondasi moral

dalam menyikapi informasi. Masyarakat yang memegang teguh Pancasila tidak akan mudah terprovokasi oleh informasi palsu yang menimbulkan kebencian atau memecah belah.

4. Penguatan Kesadaran Hukum dan Etika Informasi: Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran hoaks, termasuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Selain itu, penanaman etika digital seperti menghormati privasi, menghindari penyebaran fitnah, dan menjaga kesopanan di ruang maya menjadi aspek penting.
5. Membangun Partisipasi Aktif dalam Dunia Digital: Pendidikan Kewarganegaraan juga harus mengajarkan bahwa warga negara tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen dan pengelola informasi. Masyarakat yang sadar dan aktif dapat berperan dalam memerangi hoaks dengan menyebarkan informasi yang benar dan mengedukasi lingkungan sekitar.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hoaks terhadap stabilitas nasional dan sejauh mana Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi solusi preventif dan kuratif dalam menghadapinya. Berdasarkan hasil studi literatur dan temuan kualitatif, hoaks terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi sosial-politik dan keamanan negara. Berbagai kejadian nasional memperlihatkan bahwa penyebaran hoaks berdampak langsung pada munculnya konflik, kepanikan massal, hingga delegitimasi lembaga negara.

Pendidikan Kewarganegaraan terbukti memiliki potensi besar sebagai benteng pertahanan ideologis dan moral terhadap disinformasi. Melalui pendekatan nilai, literasi digital, dan etika hukum, PKn dapat memperkuat daya tahan warga negara dalam menghadapi arus informasi palsu. Temuan menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya berdampak sesaat, tetapi berkontribusi dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat secara kolektif. Dalam jangka panjang, hoaks dapat mengikis rasa kepercayaan terhadap institusi negara dan memperkuat sikap apatis

maupun radikal. Penafsiran atas temuan ini memperlihatkan bahwa hoaks bekerja melalui mekanisme *confirmation bias*, yaitu masyarakat cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya meskipun informasi tersebut salah.

Di sisi lain, temuan juga mengindikasikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat normatif belum sepenuhnya efektif menangani fenomena hoaks. Perlu ada pendekatan transformatif, di mana pembelajaran PKn tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga keterampilan literasi digital, pemikiran kritis, dan partisipasi aktif dalam ruang publik digital. Hasil penelitian ini menguatkan dan memperluas studi sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Nasrullah (2019) dan Raharjo (2020), yang menyatakan bahwa hoaks menjadi ancaman baru dalam era post-truth dan memerlukan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih adaptif. Penelitian ini juga memperkaya wacana mengenai *civic literacy* di Indonesia, yang belum banyak dikaitkan secara langsung dengan penanggulangan hoaks

SIMPULAN

Hoaks terbukti menjadi ancaman serius terhadap stabilitas nasional karena dapat memicu konflik sosial, merusak kepercayaan publik, dan melemahkan demokrasi. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting sebagai solusi preventif dengan menanamkan literasi digital, sikap kritis, dan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Pendidikan ini mampu membentuk warga negara yang bijak dalam menyikapi informasi digital dan tangguh menghadapi disinformasi.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah dan lembaga pendidikan disarankan untuk memasukkan materi literasi digital dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Guru diharapkan menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual, sementara masyarakat umum perlu meningkatkan kesadaran untuk tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keutuhan bangsa dari dampak negatif hoaks.

Pembelajaran Kewarganegaraan,
11(3), 192–205

DAFTAR RUJUKAN

- Azis, A. (2022). Literasi Digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menangkal Hoaks. *Jurnal Civicus*, 10(2), 115–124
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2021). Laporan Tahunan BNPT 2020: Ancaman Radikalisme dan Hoaks di Era Digital. Jakarta: BNPT
- Hidayat, D. N. (2020). Hoaks sebagai Ancaman terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1–13
- Kemendikbudristek. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2023). Siaran Pers: Penanganan Konten Hoaks Tahun 2022, Diakses dari <https://kominfo.go.id/>
- Kurniawan, A., & Ramadhan, F. (2021). Literasi Media dan Ketahanan Informasi Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 78–94
- Lestari, I., & Santoso, H. (2020). Strategi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Digital Siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 59–70
- Nurhalimah, E., & Wibowo, A. (2019). Dampak Hoaks terhadap Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 230–242
- Sapriya. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Utami, R. T., & Prasetyo, A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menangkal Disinformasi di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan*